

Kajian Fenomena Kemiskinan di Desa Pabean Udik Kabupaten Indramayu

Poverty Study in Pabean Udik Village, Indramayu Regency

¹ Nur Annisa Utami, ² Ina Helena Agustina

^{1,2}Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116

email: ¹ nurannisautami21@gmail.com, ² inahelena66@gmail.com.

Abstract. Poverty is a multidimensional problem that requires various aspects of the social, cultural, economic and political life needed. Pabean Udik is the poorest village in Indramayu District, with 1.504 deciles household target (BPS, 2015) Kabupaten Indramayu is the poorest district in Jawa Barat with 13,95 poor people, or 237.000 person in 2016 (BPS, 2016). This preventive maintenance poverty made Indramayu District create Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPKD). However, various poverty reduction policies and programs carried out by TKPKD in Indramayu District have not been implemented in a harmonious and effective way to overcome this poverty. With these problems, it is necessary to examine the phenomenon of poverty in the Pabean Udik Village. From the results of the study, it can be included for the government, especially the local government in determining the right poverty handling program. In obtaining the desired results, a qualitative descriptive analysis method was used to obtain the phenomenon of poverty in the Pabean Udik Village, namely five empirical groups covering historical, economic, socio-cultural, land-use change and stakeholders.

Keywords: study, poverty phenomenon.

Abstrak. Kemiskinan yaitu suatu permasalahan yang multidimensional yang menyangkut berbagai aspek kehidupan baik sosial, budaya, ekonomi dan politik sehingga perlu adanya penyelesaian yang bersifat menyeluruh. Desa Pabean Udik merupakan desa termiskin di Kabupaten Indramayu dengan total desil 1.504 kepala rumah tangga sasaran (BPS, 2015) dimana Kabupaten Indramayu merupakan kabupaten termiskin di Provinsi Jawa Barat dengan persentase masyarakat miskin sebesar 13,95% yaitu sebanyak 237.000 jiwa pada tahun 2016 (BPS, 2016). Dalam upaya penanganan kemiskinan Kabupaten Indramayu membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD). Namun berbagai kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh TKPKD Kabupaten Indramayu selama ini belum berjalan secara selaras dan efektif untuk mengatasi kemiskinan tersebut. Dengan problematika tersebut maka perlu untuk mengkaji fenomena kemiskinan di Desa Pabean Udik. Dari hasil kajian tersebut dapat menjadi masukan untuk pemerintah terutama pemerintah daerah dalam menentukan program penanganan kemiskinan yang tepat. Dalam memperoleh hasil yang diinginkan maka digunakan metode analisis deskriptif kualitatif sehingga diperoleh fenomena kemiskinan di Desa Pabean Udik yaitu lima kelompok empiris meliputi historis, ekonomi, sosial budaya, alih fungsi lahan dan *stakeholder* atau pemangku kepentingan.

Kata Kunci: kajian, fenomena kemiskinan.

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu Negara berkembang di dunia, dimana permasalahan pembangunan utama yang dimiliki negara-negara berkembang adalah masalah kemiskinan. Kemiskinan adalah masalah multidimensi yang berkaitan dengan kemampuan akses ekonomi, sosial, budaya, politik dan partisipasi dalam masyarakat. Kemiskinan di negara berkembang merupakan masalah yang sangat rumit, pada saat

bersamaan telah terjadi peningkatan distribusi pendapatan antara kelompok kaya dan kelompok miskin, sehingga kemiskinan relatif meningkat setiap tahunnya terutama di wilayah pedesaan. Kemiskinan pedesaan menjadi masalah utama dalam proses pelaksanaan pembangunan di daerah pedesaan. Kenyataan menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk miskin berada di daerah pedesaan, maka pembangunan pedesaan sebagai bagian dari pembangunan nasional harus mendapat prioritas utama.

Pada umumnya, pemerintah daerah menggunakan data Badan Pusat Statistik untuk menentukan penduduk miskin di suatu wilayah. Berdasarkan data BPS, Kabupaten Indramayu merupakan Kabupaten yang memiliki persentase penduduk miskin tertinggi di Provinsi Jawa Barat yaitu sebesar 13,95% dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 237.000 Jiwa pada tahun 2016. Kabupaten Indramayu terdiri dari 21 kecamatan, 309 desa dan 8 kelurahan dengan jumlah penduduk sebesar 1.728.050 jiwa berdasarkan Kabupaten Indramayu Dalam Angka Tahun 2017, dimana dari 309 desa yang ada di Kabupaten Indramayu Desa Pabean Udik menjadi desa termiskin di Kabupaten Indramayu dengan total desil 1.504 kepala rumah tangga sasaran (BPS,2015).

Berdasarkan Keputusan Presiden No.15 Tahun 2010 mengenai Percepatan Penanggulangan Kemiskinan setiap Provinsi dan Kabupaten atau Kota di amanatkan untuk membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD). Dimana tim ini dimaksudkan untuk menjalankan fungsi koordinasi penanggulangan kemiskinan tingkat kabupaten/kota. Namun berbagai kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh TKPKD Kabupaten Indramayu selama ini belum berjalan secara selaras dan efektif untuk mengatasi kemiskinan di Kabupaten Indramayu. Maka dari itu perlu adanya kajian fenomena kemiskinan di Desa Pabean Udik Kabupaten Indramayu untuk mengetahui bagaimana fenomena-fenomena kemiskinan atau penyebab apa yang menjadikan bahwa daerah tersebut dikatakan miskin dengan sudah banyaknya program pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan itu sendiri.

B. Landasan Teori

Landasan teori pada penelitian ini hanya sebagai *background* penelitian saja dan tidak digunakan dalam penentuan variabel penelitian, dimana teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini adalah pengertian kemiskinan secara umum dan jenis kemiskinan.

1. Pengertian Kemiskinan

Secara umum, kemiskinan diartikan sebagai kondisi ketidakmampuan pendapatan dalam mencukupi kebutuhan pokok sehingga kurang mampu untuk menjamin kelangsungan hidup (Suryawati, 2004: 122). Kemampuan pendapatan untuk mencukupi kebutuhan pokok berdasarkan standar harga tertentu adalah rendah sehingga kurang menjamin terpenuhinya standar kualitas hidup pada umumnya.

2. Jenis Kemiskinan

Ditinjau dari sumber penyebabnya, kemiskinan dikelompokkan menjadi tiga macam, yaitu kemiskinan natural, kemiskinan kultural, dan kemiskinan struktural.

a. Kemiskinan Natural

Kemiskinan natural atau yang disebut juga dengan kemiskinan alamiah adalah keadaan miskin karena pada awalnya memang sudah miskin. Biasanya daerah yang mengalami kemiskinan natural adalah daerah-daerah yang terisolir, jauh dari sumber daya-sumber daya yang ada.

b. Kemiskinan Kultural

Kemiskinan kultural adalah bentuk kemiskinan yang terjadi sebagai akibat

adanya sikap dan kebiasaan seseorang atau masyarakat yang umumnya berasal dari budaya atau adat istiadat yang relatif tidak mau untuk memperbaiki taraf hidup dengan tata cara modern. Kebiasaan seperti ini dapat berupa sikap malas, pemboros atau tidak pernah hemat, kurang kreatif, dan relatif pula bergantung pada pihak lain.

- c. **Kemiskinan Struktural**
Kemiskinan struktural dipahami sebagai kemiskinan yang terjadi disebabkan ketidakmerataan terhadap sumberdaya karena struktur dan peran seseorang dalam masyarakat. Kemiskinan struktural adalah bentuk kemiskinan yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang pada umumnya terjadi pada suatu tatanan sosial budaya ataupun sosial politik yang kurang mendukung adanya pembebasan kemiskinan.
3. **Indikator-Indikator Kemiskinan**
Pada umumnya aspek ekonomi dijadikan sebagai salah satu dimensi kemiskinan yang mempunyai pengaruh besar terhadap munculnya masalah kemiskinan. Selain itu, dimensi lain yang juga berpengaruh terhadap kemiskinan seperti dimensi sosial dan dimensi politik dan kesehatan.
 - a. **Dimensi Ekonomi**
Tinjauan kemiskinan dari dimensi ekonomi diartikan sebagai ketidakmampuan seseorang untuk mendapatkan mata

pencaharian yang mapan dan memberikan penghasilan yang layak untuk menunjang hidupnya secara berkesinambungan.

- b. **Dimensi Sosial**
Kemiskinan sosial diartikan sebagai kekurangan jaringan sosial dan struktur sosial yang mendukung untuk mendapatkan kesempatan agar produktivitas seseorang meningkat. Kemiskinan sosial ini disebabkan karena adanya faktor-faktor penghambat sehingga menghalangi seseorang untuk memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang tersedia.
- c. **Dimensi Politik**
Tinjauan kemiskinan dari aspek politik ini adalah ketidakmampuan seseorang dalam hal rendahnya tingkat berpartisipasi secara aktif dalam pengambilan keputusan politik yang langsung menyangkut hidupnya serta tidak dimilikinya akses yang memadai termasuk kelembagaan untuk terlibat secara langsung dalam proses politik.
- d. **Dimensi Kesehatan**
Dari berbagai data kemiskinan yang dihimpun menyebutkan adanya keterkaitan antara kemiskinan dan kualitas kesehatan masyarakat. Rendahnya kemampuan pendapatan dalam mencukupi/memenuhi kebutuhan pokok menyebabkan keterbatasan kemampuan untuk

menjangkau atau memperoleh standar kesehatan yang ideal/layak baik dalam bentuk gizi maupun pelayanan kesehatan yang memadai.

C. Hasil Penelitian

Analisis Kelompok Fenomena Empiris

Pengelompokkan tema-tema empiris pada penelitian ini berfokus pada fenomena kemiskinan di Desa Pabean Udik, dimana analisis diperoleh dari gambaran umum yang diperoleh dari hasil observasi lapangan dengan wawancara tidak terarah dan dokumentasi, maka diperoleh point-point penting yaitu historis, ekonomi, sosial budaya, alih fungsi lahan dan stakeholder atau pemangku kepentingan.

1. Historis

Desa Pabean Udik merupakan desa yang terletak di garis pantai sehingga mayoritas masyarakat berprofesi sebagai nelayan. Profesi sebagai nelayan di Desa Pabean Udik terjadi secara turun temurun dimana setiap kepala keluarga nelayan yang memiliki anak laki-laki maka dapat dipastikan bahwa anak itu akan melanjutkan profesi ayahnya sebagai nelayan, sebagian besar malah tidak melanjutkan sekolah setelah lulus sekolah dasar. Beberapa masyarakat desa berpendapat bahwa pendidikan tidak terlalu penting, “untuk apa sekolah tinggi-tinggi gak ada biaya, jadi nelayan saja seperti bapaknya”. Hal tersebut juga di dasari dengan beberapa anak di Desa Pabean Udik memang sudah di persiapkan untuk menjadi nelayan oleh orangtuanya, sehingga ada beberapa anak yang memang

sudah memutuskan untuk menjadi nelayan karena malas untuk bersekolah padahal belum tamat sekolah dasar.

2. Ekonomi

Ketimpangan pendapatan terjadi pada pelaku kegiatan ekonomi di Desa Pabean Udik, yaitu nelayan. Dimana nelayan di Desa Pabean Udik dibagi menjadi tiga yaitu nelayan kecil, nelayan bubu dan nelayan besar.

3. Adanya

ketimpangan pendapatan antar pelaku ekonomi salah satunya yaitu nelayan yang masih berstatus sebagai buruh dengan nelayan juraganpemilik kapal. Dimana sistem bagi hasil tersebut tidak adil bagi anak buah kapal, selain itu nerdasarkan wawancara seorang nelayan kecil, yang rata-rata pendapatan per bulannya hanya sekitar Rp.250.000 – Rp.400.000 perbulan Bahkan beberapa nelayan mengaku pendapatannya lebih kecil dari itu, serta nelayan bubu sebesar Rp.400.000 – 750.000 perbulan.

4. Sosial Budaya

Kemiskinan tidak hanya dilihat dari kondisi ekonomi saja karena kemiskinan berkaitan dengan berbagai aspek, diantaranya sosial budaya, dimana kita dapat melihat bahwa sosial budaya turut menjadi bagian dalam membuat seseorang menjadi miskin. Kemiskinan di Desa Pabean Udik di akibatkan karena adanya budaya kemiskinan dimana masyarakat Desa Pabean Udik memiliki kebiasaan yang konsumtif atau boros dalam membelanjakan uang dalam memenuhi kebutuhan tersier sesuatu yang hanya sekedar untuk memenuhi keinginan bukan kebutuhan.

Tabel 1. Luas Penggunaan Lahan Desa Pabean Udik Tahun 2014-2018

No	Tahun	Penggunaan Lahan (Ha)			
		Permukiman	Pertanian	Perkebunan	Tambak Ikan
1.	2014	101,11	122,37	20,57	342,52
2	2015	102,85	121,98	19,92	341,96
3	2016	104,06	117,28	21,39	341,24
4	2017	108,73	112,16	16,13	346,41
5	2018	109,43	111,92	15,73	347,33

Sumber: Google Earth dan Hasil Pengolahan Arcgis, 2018

5. Kecenderungan untuk berfoya-foya apabila baru mendapatkan uang atau pada saat banyaknya ikan hasil tangkapan yang di dapatkan. Padahal ketidakpastian pendapatan terus terjadi, dimana kebanyakan nelayan di Desa Pabean Udik tidak menyimpan kelebihan uangnya untuk tabungan yang nantinya bisa di gunakan pada musim paceklik atau sebagai modal berlayar selanjutnya, dimana masyarakat Desa Pabean Udik tidak atau kurang memiliki visi investasi. Tidak adanya kultur menabung. Akibatnya, jika hasil tangkapan banyak maka hasil penjualan selalu dihabiskan. Selain itu adanya sikap apatis terhadap program-program pemerintah juga melanda kehidupan masyarakat Desa Pabean Udik, karena terlalu sering dieksploitasi oleh pihak luar untuk kepentingan individu maupun sebagian kelompok. Akibatnya mereka sulit untuk percaya terhadap program-program yang dibuat oleh pemerintah maupun pihak lain, kecuali memang sudah terbukti memberikan implikasi terhadap perbaikan perekonomian masyarakat.
6. Alih Fungsi Lahan
Berkurangnya lahan pertanian di Desa Pabean Udik dibarengi dengan bertambahnya luas permukiman, hal tersebut membuktikan bahwa adanya alih fungsi lahan pertanian menjadi pertanian. Pada tahun 2014 luas lahan pertanian seluas 122,37 Ha sedangkan pada tahun 2018 luasnya berkurang menjadi 111,92 Ha, untuk lahan permukiman pada tahun 2014 yaitu seluas 101,11 pada tahun 2018 bertambah menjadi 109,43 Ha, seperti dijelaskan pada Tabel 1. Alih fungsi lahan di Desa Pabean Udik terjadi pada lahan pertanian yaitu sawah. Berdasarkan hasil wawancara, hampir sebagian besar sawah yang ada di Desa Pabean Udik sudah dibeli oleh BTN terutama sawah-sawah yang letaknya dipinggir jalan besar. Beberapa masyarakat yang menjual tanahnya karena harga yang ditawarkan tinggi, selain itu adanya kebutuhan ekonomi yang mendesak serta ingin beralih profesi menjadi pedagang

maupun nelayan. Hal tersebut menyebabkan masyarakat yang berprofesi sebagai buruh tani menjadi kehilangan penghasilan. Beberapa masyarakat yang menjual tanahnya mengaku menyesal karena tidak berhasil dalam profesi barunya serta kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki menyebabkan pengelolaan uang yang kurang baik sehingga kebanyakan dari mereka mengalami kebangkrutan.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari aparat desa pembelian sawah masyarakat oleh BTN tersebut terjadi karena adanya kebijakan pemerintah yaitu program sejuta rumah untuk rakyat dimana lahan sawah yang dibeli oleh BTN nantinya akan dibangun perumahan bersubsidi. Sudah ada beberapa sawah yang dijadikan perumahan bersubsidi salah satunya yaitu Perumahan Bumi Prasetya Pabean Kencana yang dikembangkan oleh PERUMNAS. Mayoritas masyarakat yang menempati perumahan tersebut berasal dari luar desa bahkan luar Kabupaten Indramayu.

7. *Stakeholder* atau Pemangku Kepentingan
Stakeholder atau pemangku kepentingan pada penelitian ini merupakan orang atau kelompok-kelompok yang memiliki pengaruh positif maupun negatif terhadap fenomena kemiskinan di Desa Pabean Udik, diantaranya yaitu juragan kapal atau juragan nelayan, money lender atau peminjam modal dan tengkulak.
 - a. Nelayan Juragan atau Pemilik Kapal

Juragan kapal atau nelayan juragan biasanya selain meminjamkan kapal juga meminjamkan modal dimana hasil bagi itu dilakukan dengan sistem 50:50, dimana setelah hasil tangkapan dijual dan dipotong 20% untuk biaya operasional lalu dikurangi modal yang di pinjam, sisanya di bagi dua antara buruh nelayan (seluruh ABK, baik 2-16 orang) dengan nelayan juragan. Pembagian tersebut sangat timpang, walaupun besar bagian yang diperoleh sama, tetapi pada nelayan buruh bagian yang diperoleh itu harus di bagi-bagi lagi dengan ABK (Anak Buah Kapal) yang ada. Sistem bagi hasil tersebut masih diperparah dengan kewajiban nelayan buruh untuk ikut serta dalam memperbaiki kerusakan kapal maupun alat tangkap yang digunakan. Hal itu sangat tidak adil, pendapatan buruh sangat kecil sedangkan pendapatan juragan sangat besar, itulah sebabnya kondisi ekonomi antara juragan kapal dengan nelayan buruh memiliki kesenjangan yang sangat besar.

- b. *Money Lender* atau Pemilik Modal
 Pemilik modal sangat berpengaruh penting dalam keberlangsungan kegiatan para nelayan di Desa Pabean Udik dan berdampak pada sumber pendapatan para nelayan. Untuk beberapa nelayan di Desa Pabean

Udik yang ingin mandiri, memiliki alat tangkap serta perahu sendiri namun memiliki modal terbatas bahkan tidak memiliki modal sama sekali, satu-satunya jalan yang di tempuh yaitu dengan mencari pinjaman modal. Namun mereka mengaku untuk mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan resmi seperti Bank BRI maupun BNI tidak mudah, sehingga mereka mencari orang atau pemilik modal yang mau meminjamkan modalnya. Memang tidak setiap nelayan bisa memperoleh pinjaman dengan mudah dari pemilik modal, karena pemilik modal biasanya hanya mau meminjamkan uangnya kepada nelayan yang dianggap bisa dipercaya. Karena itu biasanya diperlukan seorang penjamin yang memiliki hubungan dekat dengan pemilik modal, yang dapat meyakinkan kepada pemilik modal bahwa orang itu betul-betul bisa dipercaya. Sayangnya, pemilik modal yaitu orang-orang yang tentu saja sangat mengharapkan keuntungan dari pinjaman tersebut. Keuntungan yang dimaksud bukan diperoleh dari bunga yang harus di bayar, namun dari hasil ikan yang diperoleh nelayan. Dimana pemilik modal mengharuskan nelayan untuk menjual hasil tangkapannya kepada mereka dengan harga murah

dan penentuan harga secara sepihak. Namun disisi lain, para nelayan peminjam beranggapan bahwa hal tersebut menguntungkan, kemudahan penjualan yaitu pemilik modal membeli semua hasil tangkap dari nelayan peminjam. Tetapi hal tersebut mengakibatkan pendapatan nelayan sangat kecil dan tidak dapat berkembang. Hal tersebut telah menjadi roda penggerak kemiskinan di Desa Pabean Udik.

c. Tengkulak

Masalah pemasaran hasil tangkap ikan maupun hasil panen berupa padi sangat penting dalam kehidupan masyarakat Desa Pabean Udik yang berprofesi sebagai nelayan maupun petani. Permasalahan yang ada pada para petani yaitu tidak memiliki akses pasar. Maka dari itu peranan tengkulak menjadi sangat penting dalam kehidupan petani. Lemahnya posisi petani sering dimanfaatkan oleh para tengkulak dengan membeli hasil panen dengan harga murah dan menjualnya dengan harga mahal.

Masalah pemasaran untuk para nelayan yaitu walaupun adanya TPI (Tempat Pelelangan Ikan) yang bisa membantu para nelayan untuk memasarkan hasil tangkapannya tidak sesuai dengan harapan karena TPI yang ada di dekat Desa Pabean Udik tepatnya di Desa Karangsong tidak di

lakukan sistem lelang, melainkan TPI hanya berfungsi sebagai pasar ikan sehingga tidak dapat mendongkrak harga penjualan ikan. Maka kebanyakan nelayan memilih menjual kepada tengkulak karena dianggap sama saja.

Dialog Al-Qur'an

Islam sangat hati-hati dalam memandang kekayaan dan kemiskinan. Namun Islam tidak pernah melarang umatnya untuk menjadi kaya dan tidak pernah pula menyuruh umatnya untuk menjadi miskin. Islam hanya memberikan warning agar umatnya tidak terjebak dalam kekayaan semu. Dialog Al-Qur'an antara hasil analisis

فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ ﴿١٥﴾
 وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهْنَنِ ﴿١٦﴾ كَلَّا بَلْ لَا
 تَكْرُمُونَ الْيَتِيمَ ﴿١٧﴾ وَلَا تَحْضُونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمَسْكِينِ ﴿١٨﴾ وَتَأْكُلُونَ
 التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا ﴿١٩﴾ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا
 جَمًّا ﴿٢٠﴾

mengenai kajian fenomena kemiskinan yang akan di bahas yaitu dberdasarkan QS Al-Fajr ayat 15-20 :

“Adapun manusia apabila Rabb-nya mengujinya lalu dimuliakannya dan diberinya kesenangan, maka dia berkata: “Rabb-ku telah memuliakanku.” (QS. 89: 15) Adapun bila Rabb-nya mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata: “Rabb-ku menghinakanku.” (QS. 89: 16) Sekali-kali tidak demikian, sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim, (QS. 89: 17) dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin, (QS. 89: 18) dan kamu

memakan harta pusaka dengan cara mencampurbaurkan (yang halal dan yang bathil), (QS. 89: 19) dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan. (QS. 89: 20)”

Allah mengingkari orang-orang yang berkeyakinan bahwa Allah meluaskan rizki kepada hambanya dimaksudkan untuk memuliakannya sedangkan bila Allah menyempitkan rizki kepada hambanya merupakan suatu penghinaan, namun kenyataannya tidaklah seperti itu, karena pada hakikatnya kekayaan dan kemiskinan adalah ujian Allah pada manusia dengan kondisi yang berbeda-beda. Kemuliaan bukan dilihat pada banyak atau sedikitnya harta. Kemuliaan adalah dilihat pada ketaatan pada Allah dan bagaimana ia menggunakan segala nikmat untuk tujuan akhirat. Jika Allah memberi rizki baginya di dunia, ia pun memuji Allah dan bersyukur pada-Nya.

Berdasarkan fenomena kemiskinan yang terjadi di lapangan bahwa terjadi ketimpangan pendapatan antara pemilik kapal atau nelayan juragan dengan buruh nelayan dimana nelayan juragan bahil (pelit) terhadap hartanya sendiri dan terlalu berlebihan sedangkan mereka tidak membagi hasil tangkap ikan secara adil sehingga terjadilah ketimpangan, dimana dalam ekonomi islam seharusnya kerjasama dapat meningkatkan kesejahteraan, mencegah penindasan ekonomi dan distribusi kekayaan yang tidak merata, dan melindungi kepentingan ekonomi dari pihak atau golongan ekonomi lemah dan memperjuangkan kepentingan bersama juga kesejahteraan masyarakat.

Selain itu kemiskinan tentu saja diakibatkan oleh berbagai faktor-faktor yang berasal dari dalam diri manusia yaitu ia tidak mensyukuri apa yang telah didapatkan dan merasa kekurangan karena tidak berusaha

untuk mencari rezeki yang ada di muka bumi ini. Maka perlu adanya kesadaran diri dari masyarakat dan mengurangi ego untuk tidak bersifat apatis terhadap program-program pemerintah yang ada agar dapat memiliki kehidupan yang lebih layak, karena pada dasarnya setiap kerja keras yang dilakukan di dunia semata-mata hanya untuk kehidupan di akhirat yaitu kehidupan yang kekal dan abadi.

D. Kesimpulan

Berdasarkan tujuan penelitian ini yaitu mengkaji fenomena kemiskinan di Desa Pabean Udik Kabupaten Indramayu, maka hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat lima fenomena kemiskinan di Desa Pabean Udik yaitu sebagai berikut:

1. Historis
2. Ekonomi
3. Alih Fungsi Lahan
4. Sosial Budaya
5. Stakeholder atau Pemangku Kepentingan

Sehingga dapat diketahui bahwa secara umum kemiskinan di Desa Pabean Udik terjadi karena adanya kebiasaan yang diwariskan atau terwariskan secara alamiah maupun juga 'dipaksakan' yang sudah melekat pada sistem kehidupan mereka yaitu kesadaran masyarakat sendiri. Sehingga perlu adanya penyadaran atau perubahan pemikiran masyarakat terhadap pemerintah itu sendiri. Karena dengan program-program pemerintah sekarang yang bersifat *general*, tidak akan mampu mengatasi kemiskinan yang ada di Desa Pabean Udik.

E. Rekomendasi

Hasil dari kesimpulan analisis serta penemuan lapangan, dimana kemiskinan di Desa Pabean Udik Kabupaten Indramayu ini tidak dapat ditanggulangi dengan program-

program pemerintah yang bersifat *general*. Maka peneliti memberikan rekomendasi terhadap penelitian mengenai Kajian Fenomena Kemiskinan di Desa Pabean Udik Kabupaten Indramayu sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah Diperlukan monitoring dan riset khusus agar kegiatan dan program penanggulangan kemiskinan di Desa Pabean Udik dapat berjalan lebih efektif sama halnya pada desa-desa lainnya di Kabupaten Indramayu. Kebijakan pemerintah terkait penanggulangan kemiskinan harus bersifat *bottom up* sesuai dengan kondisi, karakteristik dan kebutuhan masyarakat. Kebijakan yang lahir berdasarkan partisipasi atau keterlibatan masyarakat sebagai subjek.
2. Perlu adanya peningkatan kesadaran masyarakat atau pemberdayaan masyarakat melalui *agent development* yang baru yang dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, *agent development* tersebut bisa berasal dari kalangan perguruan tinggi yang dapat di percaya, ulama atau masyarakat Desa Pabean Udik sendiri. Sehingga nantinya melalui pemberdayaan masyarakat tersebut masyarakat Desa Pabean Udik dapat berpartisipasi mulai dari identifikasi kebutuhan, proses perencanaan, perumusan program sampai dengan evaluasi program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik secara ekonomi, sosial, budaya dan politik.
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat atas pentingnya

pendidikan. Serta diperlukan motivasi agar memiliki kemauan yang tinggi untuk mencapai tingkat pendidikan yang lebih baik dan hidup yang lebih berkualitas.

4. Mengurangi ketergantungan terhadap tengkulak dan pemilik modal sehingga nelayan dan pedagang ikan dan peminjam berada dalam posisi yang seimbang. Karena itu, perlu adanya suatu lembaga yang mampu menggantikan peran yang selama ini dilakukan oleh tengkulak dan pemilik modal sangat diperlukan. Lembaga ini juga berfungsi menyalurkan pinjaman untuk peningkatan teknologi kenelayanan. Selain itu, untuk meningkatkan pendapatan buruh nelayan yang bekerja kepada juragan kapal, perlu adanya perbaikan sistem bagi hasil, sehingga diperlukan perangkat aturan yang mendukungnya, yang bisa lebih menjamin terwujudnya keadilan dalam sistem bagi hasil.
5. Pola kehidupan masyarakat perlu untuk diubah. Hal ini terkait dengan pola pikir dan kebiasaan. Pola hidup konsumtif harus diubah agar nelayan tidak terpuruk ekonominya saat tidak ada hasil tangkap yang diperoleh. Selain itu membiasakan budaya menabung supaya tidak terjerat rentenir. Membangun diverifikasi mata pekerjaan khusus perlu dipersiapkan menghadapi masa paceklik, seperti pengolahan ikan menjadi makanan.

Daftar Pustaka

- Ancok, D. 1995. *Nuansa Psikologi Pembangunan*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Arifin, Zainal. 2016. *Perkembangan Data Kemiskinan*.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Indramayu. 2015. *Rencana Strategis Badan Pusat Statistik Kabupaten Indramayu Tahun 2015-2019*.
- Badan Pusat Statistik Kecamatan Indramayu. 2011-2018. *Kecamatan Indramayu Dalam Angka*.
- Chambers, Robert. 1983. *Pembangunan Desa Mulai dari Belakang*. LP3ES. Jakarta
- Effendi, Jaenal. 2005. *Strategi Penanggulangan Kemiskinan dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Kabupaten Indramayu)*.
- Harahap, Sofyan Syafri. 2006. *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Hidaya, Nurul. 2017. *Fenomena Kemiskinan di Kota Makassar dalam Perspektif Islam*.
- Juliantono, Ferry., dan Munandar, Aris. 2016. *Fenomena Kemiskinan Nelayan: Perspektif Teori Struktural*. Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan. No 02. Vol 12.
- Kartasasmita, Ginanjar, 1993. *Kebijaksanaan dan Strategi Pengentasan Kemiskinan*. Malang, Unibraw Fakultas Ilmu Administrasi.
- Khabhibi, Achmad. 2013. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan*.
- Kleden, Ignas.1987. *Sikap Ilmiah dan Kritik Kebudayaan*. LP3ES. Jakarta.
- Nugroho, Heru. 1995. *Kemiskinan, Ketimpangan dan Kesenjangan*. Aditya Media. Yogyakarta.
- Ramadhan, Muhammad. 2017.

- Fenomena Kemiskinan di Kelurahan Pampang Kecamatan Panakkukan Kota Makasar.*
- Pemerintah Kabupaten Indramayu. 2011. Materi Teknis Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Indramayu Tahun 2011-2031.
- Sugyono. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta. Bandung.
- Sumodiningrat, Gunawan. 1999. *Pemberdayaan Masyarakat, Jaring Pengaman Sosial*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Sunandi, Entis. 2013. *Analisis Statistika Deskriptif dalam Pemetaan Kemiskinan di Kota Bengkulu*.
- Supriatna, T. 1997. *Birokrasi Pemberdayaan dan Pengentasan Kemiskinan*. Humaniora Utama. Bandung.
- Suryawati. 2004. *Teori Ekonomi Mikro*. Jarnasy. Yogyakarta.
- Widjajanti, Asep, Akhmadi. 2016. *Penetapan Kriteria dan Variabel Pendataan Penduduk Miskin yang Komperhensif dalam Rangka Perlindungan Penduduk Miskin di Kabupaten/Kota*.
- Wijanarko, Vendi. 2013. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember*.
- Wongdesmiwati. 2009. *Pertumbuhan Ekonomi dan Pengetasan Kemiskinan di Indonesia Tahun 1990-2004: Analisis Ekonometrika*. Jurnal Ekonomi Pembangunan.
- Zartika, Cica. 2016. *Studi Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan Masyarakat Desa Lohia Kabupaten Muna*.